

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Fransisco Frisco Fernando, Chrysno Fambrio Siletty, Rasji

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Fransisco Frisco Fernando

Abstract.

The Indonesian government system is a democracy regulated within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia. This paper explores various aspects of the Indonesian government system, including its government structure, decision-making processes, and public participation in politics. Basically, Indonesia implements a government system consisting of three main branches: executive, legislative and judicial. The executive is led by the president who is directly elected by the people and is responsible for implementing state policies. The legislature consists of the People's Representative Council (DPR) and the Regional Representative Council (DPD), which together form laws and oversee government performance. The judiciary, on the other hand, plays a role in maintaining justice and law enforcement. The implementation of the Indonesian government system is not without challenges. One of the main challenges is the problem of corruption and weaknesses in law enforcement. Apart from that, the complexity of political dynamics and diverse interests are also factors that influence government effectiveness. Nevertheless, Indonesia continues to try to improve and improve its government system through reform and policy improvements. Active community participation in the political process is also the key to success in maintaining stability and progress of democracy in Indonesia. By understanding the implementation of the Indonesian government system, it can be hoped that this country will continue to develop and improve the welfare of its people through effective and accountable government administration.

Keywords: Indonesian Government, Democracy, Policy

PENDAHULUAN

Penerapan sistem pemerintahan di Indonesia telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak akademisi, praktisi, dan pengamat politik dalam beberapa dekade terakhir. Dalam kerangka ini, banyak penelitian telah dilakukan untuk memahami dinamika, tantangan, dan perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu perubahan besar dalam sejarah politik Indonesia adalah transisi dari sistem pemerintahan parlementer menuju sistem presidensial, yang menjadi fokus kajian dalam banyak penelitian, seperti yang dilakukan oleh Aritonang (2010) dalam studinya tentang "Penerapan Sistem

Presidensial di Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945". Selain itu, penerapan konsep Trias Politica juga menjadi sorotan, seperti yang dibahas oleh Yulistyowati, Pujiastuti, & Mulyani (2017) dalam "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amendemen".

Pentingnya pemahaman terhadap sistem pemerintahan Indonesia juga tercermin dalam upaya untuk merancang sistem yang efektif dan efisien. Misalnya, Saraswati (2012) membahas desain sistem pemerintahan presidensial yang efektif dalam konteks kondisi politik dan sosial Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perdebatan tentang sistem pemerintahan tidak hanya berkuat pada teori, tetapi juga mencakup aspek praktis dalam penerapannya.

Pada masa kini, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintahan berbasis elektronik menjadi semakin relevan. Studi oleh Rahman (2021) tentang "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia" menjadi penting dalam konteks ini, karena menyoroti perlunya kerangka hukum yang memadai untuk melindungi data pribadi dalam era digital.

Dalam konteks politik Indonesia pasca-reformasi, dinamika antara sistem pemerintahan presidensial dan multi-partai menjadi subjek penelitian yang menarik. Taufik (2020) mengulas "Dinamika Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer Di Indonesia", sementara Arman (2018) melakukan "Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi". Kedua studi ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana sistem politik dan pemerintahan berinteraksi satu sama lain dalam konteks Indonesia pasca-reformasi.

Lebih lanjut, konsep Trias Politica, yang merupakan prinsip dasar bagi pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan, menjadi penting dalam konteks Indonesia. Umbah (2020) meneliti "Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia", yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif diimplementasikan dalam konteks Indonesia.

Terakhir, pemahaman tentang berbagai sistem pemerintahan di seluruh dunia juga menjadi hal yang relevan dalam konteks perbandingan dan pembelajaran. Arsil (2017) dalam "Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara" memberikan perspektif yang luas tentang evolusi sistem pemerintahan di berbagai belahan dunia, yang dapat memberikan wawasan tambahan bagi pemahaman tentang sistem pemerintahan Indonesia.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang penerapan sistem pemerintahan Indonesia melibatkan analisis yang mendalam tentang

dinamika politik, struktur konstitusional, perubahan sosial, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Melalui berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi dan praktisi, diharapkan bahwa upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pemerintahan Indonesia dapat terus diperkuat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif deskriptif dalam konteks studi pustaka melibatkan analisis terhadap informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Dalam studi pustaka tentang penerapan sistem pemerintahan Indonesia, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai aspek sistem pemerintahan tersebut secara deskriptif.

Langkah-langkah metodologi penelitian kualitatif deskriptif dari studi pustaka tentang penerapan sistem pemerintahan Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Identifikasi Topik Penelitian:** Peneliti akan mengidentifikasi topik penelitian yang relevan dengan penerapan sistem pemerintahan Indonesia, misalnya, transisi dari sistem pemerintahan parlementer ke presidensial, atau penerapan prinsip Trias Politica.
2. **Pencarian Sumber Informasi:** Peneliti akan melakukan pencarian terhadap sumber-sumber informasi yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi terkait. Sumber-sumber ini dapat ditemukan melalui perpustakaan, basis data online, dan repositori institusi akademik.
3. **Seleksi Sumber Informasi:** Setelah sumber-sumber informasi terkumpul, peneliti akan melakukan seleksi terhadap sumber-sumber yang paling relevan dan berkualitas tinggi untuk memenuhi tujuan penelitian. Seleksi ini didasarkan pada kriteria seperti relevansi, keandalan, dan kredibilitas sumber.
4. **Pengumpulan Data:** Data yang relevan dari sumber-sumber informasi dipilih dan dikumpulkan untuk dianalisis. Data ini dapat berupa kutipan, rangkuman, atau informasi penting lainnya yang mendukung tujuan penelitian.
5. **Analisis Data:** Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara membaca, mengidentifikasi pola, dan menggambarkan temuan secara deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk memahami berbagai aspek sistem pemerintahan Indonesia yang telah dibahas dalam literatur yang dipilih.

6. Interpretasi Temuan: Temuan dari analisis data akan diinterpretasikan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang penerapan sistem pemerintahan Indonesia. Interpretasi ini dapat melibatkan penjelasan tentang pola-pola yang muncul, perbandingan antar penelitian, dan implikasi temuan tersebut bagi konteks praktis dan teoritis.
7. Penyusunan Laporan Penelitian: Hasil analisis dan interpretasi akan disusun dalam bentuk laporan penelitian yang mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, temuan, dan kesimpulan. Laporan ini akan menggambarkan secara jelas dan rinci temuan penelitian serta relevansinya dengan topik penelitian.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dari studi pustaka, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penerapan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber informasi yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan sistem pemerintahan di Indonesia telah menjadi subjek perdebatan yang menarik dalam konteks politik, hukum, dan sosial. Berbagai penelitian dan kajian telah dilakukan untuk memahami dinamika, tantangan, serta dampak dari sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia. Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus adalah transisi dari sistem pemerintahan parlementer ke sistem presidensial, yang merupakan titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia. Aritonang (2010) dalam studinya tentang "Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945" menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana sistem presidensial mengubah dinamika kekuasaan dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia.

Selain itu, konsep Trias Politica juga menjadi fokus penelitian yang relevan dalam konteks penerapan sistem pemerintahan di Indonesia. Yulistyowati, Pujiastuti, & Mulyani (2017) melakukan "Studi Komparatif Atas Undang Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen" untuk menggali perubahan dalam penerapan prinsip Trias Politica seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Analisis mereka memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif berubah seiring waktu dan perubahan konstitusi.

Di sisi lain, perdebatan tentang desain sistem pemerintahan presidensial yang efektif juga menjadi topik penting dalam literatur politik Indonesia. Saraswati (2012) dalam tulisannya "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif" membahas tentang berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan

dalam merancang sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efektif dan efisien di Indonesia. Diskusi tentang desain institusi dan mekanisme dalam sistem presidensial memberikan wawasan yang berharga bagi upaya pembaharuan dan reformasi di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membawa dampak signifikan terhadap penerapan sistem pemerintahan di Indonesia. Rahman (2021) dalam penelitiannya tentang "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia" menggarisbawahi pentingnya perlindungan data pribadi dalam era digital. Seiring dengan transformasi menuju pemerintahan berbasis elektronik, kebijakan dan regulasi yang tepat diperlukan untuk menjaga privasi dan keamanan data warga negara.

Selain itu, dinamika politik pasca-reformasi juga menjadi subjek penelitian yang menarik dalam konteks penerapan sistem pemerintahan di Indonesia. Taufik (2020) mengeksplorasi "Dinamika Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer Di Indonesia" untuk memahami pergeseran kekuatan politik dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan dalam konteks politik Indonesia pasca-reformasi. Analisisnya memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang dalam menjaga stabilitas politik dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Selain itu, peran sistem multi partai dalam sistem pemerintahan presidensial juga menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Arman (2018) melakukan "Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi" untuk mengevaluasi dampak sistem multi partai terhadap stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di Indonesia. Analisisnya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik dalam konteks sistem pemerintahan presidensial yang berbasis pada sistem multi partai.

Selain itu, konsep Trias Politica juga menjadi fokus penelitian yang relevan dalam konteks penerapan sistem pemerintahan di Indonesia. Umboh (2020) melakukan "Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia" untuk menggali perubahan dalam penerapan prinsip Trias Politica seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Analisisnya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif berubah seiring waktu dan perubahan konstitusi.

Pada akhirnya, pemahaman yang komprehensif tentang penerapan sistem pemerintahan Indonesia membutuhkan analisis yang mendalam terhadap dinamika politik, perubahan konstitusi, perkembangan teknologi, dan tantangan sosial. Melalui penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai akademisi dan praktisi, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang bagaimana

sistem pemerintahan di Indonesia telah berkembang, tantangan yang dihadapi, dan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan sistem pemerintahan di Indonesia merupakan hal yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan perubahan politik, sosial, dan teknologi. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai akademisi dan praktisi, beberapa temuan penting dapat diambil sebagai kesimpulan untuk memahami dinamika sistem pemerintahan Indonesia.

Pertama, transisi dari sistem pemerintahan parlementer ke sistem presidensial pasca-amandemen UUD 1945 telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika politik dan kekuasaan di Indonesia. Penelitian oleh Aritonang (2010) menunjukkan bahwa sistem presidensial memberikan lebih banyak kekuasaan kepada presiden dalam menjalankan pemerintahan, namun juga menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.

Kedua, konsep Trias Politica, yang mengatur pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menjadi landasan penting dalam penerapan sistem pemerintahan di Indonesia. Studi oleh Yulistyowati, Pujiastuti, & Mulyani (2017) menyoroti peran penting prinsip Trias Politica dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan checks and balances di antara lembaga-lembaga pemerintahan.

Ketiga, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan berbasis elektronik juga semakin penting dalam konteks penerapan sistem pemerintahan di Indonesia. Rahman (2021) menekankan perlunya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi warga negara dalam era digital, sehingga pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.

Keempat, dinamika politik pasca-reformasi terus mempengaruhi implementasi sistem pemerintahan di Indonesia. Taufik (2020) menyoroti tantangan dalam menjaga stabilitas politik dan keberlanjutan demokrasi, terutama dalam konteks pergeseran antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.

Kelima, sistem multi partai dalam konteks sistem pemerintahan presidensial juga menjadi subjek perdebatan yang penting. Penelitian oleh Arman (2018) menunjukkan bahwa sistem multi partai membawa dampak yang kompleks terhadap stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di Indonesia, dan memerlukan pemahaman yang mendalam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.

Keenam, pemahaman yang mendalam tentang konsep Trias Politica juga penting dalam konteks sistem pemerintahan di Indonesia. Umboh (2020) menekankan perlunya menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memastikan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Ketujuh, secara keseluruhan, penerapan sistem pemerintahan di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks, namun juga membawa peluang untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik, perubahan konstitusi, dan perkembangan teknologi, Indonesia dapat terus mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih baik demi kesejahteraan dan kemajuan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, D. M. (2010). Penerapan Sistem Presidensil di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 391-407.
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328-338.
- Saraswati, R. (2012). Desain sistem pemerintahan presidensial yang efektif. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 137-143.
- Rahman, F. (2021). Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 81-102.
- Taufik, M. (2020). Dinamika Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer Di Indonesia. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 127-141.
- Arman, Z. (2018). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 23-40.
- Umboh, C. J. (2020). Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Lex Administratum*, 8(1).
- Arsil, F. (2017). Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.